

The Effect of Participatory Budgeting, Internal Control Systems, Ethical Behavior of Leaders and Organizational Culture on Public Accountability

Muhammad Khairus Sholihin¹, Endar Pituringsih², Ni Ketut Surasni³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Article Accepted: 22 June 2021 Publication : 11 July 2021</p>	<p><i>This research aims to test and obtain empirical evidence regarding the effect of participatory budgeting, internal control systems, ethical behavior of leaders, and organizational culture on public accountability. This research was conducted on all NGOs in West Nusa Tenggara Province, using a purposive sampling technique with sample used by 102 people and using multiple linear regression. The results of this study indicate that participatory budgets have a positive and significant effect on accountability, the internal control system has a positive and significant effect on public accountability, the ethical behavior of leaders has a positive and significant effect on public accountability, organizational culture has a positive but insignificant effect on public accountability.</i></p>
<p>Keywords: Anggaran Partisipatif; Sistem Pengendalian Intern; Perilaku Etis Pimpinan; Budaya Organisasi; Akuntabilitas Publik</p>	
Article Info	Abstrak
<p>Article history:</p> <p>Article Accepted: 22 Juni 2021 Publication : 11 Juli 2021</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh anggaran partisipatif, sistem pengendalian interna, perilaku etis pimpinan, dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini dilakukan pada seluruh NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggunakan teknik sampel purposive dengan jumlah sampel 102 orang dan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas, Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, Perilaku etis pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik, Budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik</p>
<p>Keywords: Participatory Budget; Internal Control System; Ethical Behavior Of Leaders; Organizational Culture; Public Accountability</p>	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author:</p> <p>Muhammad Khairus Sholihin Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia</p>	

1. PENDAHULUAN

Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa dan lainnya (Mahsun *et al.*, 2007: 11). Hal ini

menunjukkan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi pemerintahan, akan tetapi organisasi – organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengejar laba maka termasuk dalam organisasi sektor publik tersebut. Jika memandang organisasi sektor publik hanya pemerintahan maka fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak akan bisa dipenuhi semua karena beragam dan kompleksnya kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang salah satunya Organisasi Non Pemerintah / *Non Government Organization* (NGO).

NGO di Indonesia lebih di kenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU Nomor 17 Tahun 2013). Pemerintah memberikan ruang kepada NGO untuk ikut berpartisipasi salah satunya dengan penyampaian informasi penting ataupun memberikan layanan kepada masyarakat (Cribb, 2006). Selaian itu, NGO juga memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan pembangunan dan upaya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Herdiansah dan Randi, 2016). Peranan penting yang dipegang oleh NGO sebagai mitra pemerintah menjadikan NGO mengalami peningkatan yang sangat cepat. Hal ini terlihat dari jumlah NGO di Indonesia yang tercatat sangat banyak yaitu 11.468 NGO pada tahun 2010 (STATT, 2012) dan telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 3,4 triliun pada tahun 2013 (NSSC, 2015).

Peningkatan jumlah dan perolehan NGO tersebut belum dibarengi dengan peningkatan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari laporan tahunan NGO, yaitu hanya 17% dari 70 NGO yang membuat laporan tahunan baik dalam bentuk cetakan atau melalui *website* (Abidin dan Rukmini, 2004). Selain itu, kebanyakan laporan NGO hanya ditujukan kepada donatur, minimnya penyajian informasi aktivitas organisasi kepada masyarakat dan kurangnya pengawasan distribusi dana (Fikri, 2010). Dari segi penerapan kode etik, hanya 45% tergolong baik dan sisanya 55% tergolong memadai (Council, 2012). Pada aspek keterlibatan Dewan Pengurus, beberapa NGO Indonesia memiliki Dewan Pengurus yang sangat dominan dan memiliki kendali penuh terhadap manajemen sehingga Direktur Eksekutif dan staf betul-betul hanya sebagai pelaksana (Herlina, 2012).

Beberapa temuan di atas seharusnya tidak terjadi jika penerapan *Good NGO Governance* berjalan dengan baik. Menurut Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMMD), salah satu nilai dasar dalam penerapan *Good NGO Governance* adalah akuntabilitas publik (Sandovi dan Putra, 2018). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002: 20).

Asas akuntabilitas publik yang harus dipegang oleh NGO sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah asas pertanggungjawaban vertikal (kepada donatur) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai penerima manfaat (Turner dan Hulme, 1997). Oleh karena itu untuk mengukur derajat akuntabilitas publik NGO tidak cukup menyoroti persoalan teknis, seperti keuangan dan program, tetapi juga partisipasi, konsultasi dan proses demokratisasi internal, karena akuntabilitas publik NGO adalah proses yang menempatkan NGO bertanggung jawab secara terbuka atas apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya kepada *stake holder* (kelompok sasaran, lembaga donor, sesama NGO, pemerintah dan masyarakat luas). Akuntabilitas publik diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*) dan cepat tanggap (*responding*) (Abidin dan Rukmini, 2004).

Permasalahan yang muncul di pengelolaan NGO juga harus ditinjau dari perspektif *stewardship theory*. *Stewardship theory* merupakan penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1989). Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bekerjasama karena bertindak sesuai

dengan tindakan principal dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama (Raharjo, 2007). Penggunaan *stewardship theory* didasarkan pada prinsip pendirian NGO yakni kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan sehingga hal utama yang dipentingkan adalah pencapaian tujuan organisasi bukan kepentingan pribadi.

Permasalahan akuntabilitas publik NGO di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Hal ini terlihat dari adanya NGO bermasalah dalam pertanggungjawaban anggaran kepada publik, dan ada juga yang hanya bermodalkan stempel (Antara News, 26 Juli 2009), sehingga beberapa NGO di Nusa Tenggara Barat dibekukan (Radar Tambora, 9 November 2017). Akuntabilitas NGO yang disinyalir kurang baik menjadikan tingkat kepercayaan Publik terhadap NGO berada pada angka 64 persen yaitu selalu lebih rendah dibandingkan media massa yang menempati 67 persen dan kepercayaan kepada pemerintah dan bisnis yang mencapai level di atas 70 persen (Tirto, 14 Maret 2017). Keberadaan NGO yang mengatasnamakan dirinya di atas kepentingan rakyat, mengharuskan menjaga kepercayaan publik, bukan saja dengan cara program-program yang diorientasikan pada kebutuhan masyarakat, tetapi harus ada sistem di mana masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan NGO termasuk partisipasi dalam penyusunan anggaran (Masduki, 2002). Anggaran partisipasi didefinisikan sebagai pendekatan penganggaran yang memungkinkan para pimpinan yang akan bertanggung jawab terhadap anggaran untuk berpartisipasi dalam pengembangan anggaran, partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggung jawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas (Hansen / Mowen, 2013: 448).

Akuntabilitas NGO juga tidak lepas dari pengaruh perilaku etis pimpinan karena pimpinan merupakan pemegang kendali bagi suatu organisasi. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma – norma sosial yang berlaku secara umum sehubungan dengan perilaku – perilaku yang bermanfaat dan membahayakan (Yusuf, 2009). Perilaku etis sangat erat kaitannya dengan kesadaran individu untuk mematuhi norma-norma sosial yang ada. Terkait dengan perilaku etis pimpinan tentunya membutuhkan kesadaran akan peran dirinya sebagai agen moral bagi bawahannya, sehingga perilaku etis bagi pimpinan dipandang sebagai salah satu komponen suksesnya pemimpin dalam menjalankan operasi organisasi (Yusuf, 2009). Dengan demikian, jika kesadaran pimpinan NGO akan fungsi sebagai agen moral tentunya akan berdampak kepada keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berdasarkan norma dan aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Pertanggungjawaban pimpinan atas pengelolaan organisasi kepada *stakeholder* merupakan cerminan dari akuntabilitas organisasi sektor publik.

Disamping itu, akuntabilitas NGO juga harus ditinjau hubungannya dengan budaya organisasi karena budaya merupakan sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya (Robbins dan Judge, 2008: 315), sehingga budaya suatu organisasi menjadi cerminan organisasi tersebut. Budaya merupakan berbagai interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang dalam lingkungannya (Koesmono, 2005). Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya organisasi harus diciptakan, dipertahankan, dan diperkuat serta diperkenalkan kepada karyawan melalui proses sosialisasi (Nurtjahjani dan Masreviastuti, 2007).

Menurut Robbins (2003:321), terdapat tiga faktor yang membentuk budaya dalam organisasi, yaitu : (1) komunikasi, (2) motivasi, dan (3) kepemimpinan. Kaitannya dengan budaya yang harus dipertahankan, diperkuat serta disosialisasikan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas NGO sebagai salah satu organisasi sektor publik. Budaya organisasi yang baik akan berakibat pada efektivitas penerapan akuntansi sektor publik dan selanjutnya efektivitas penerapan akuntansi sektor publik akan berdampak baik kepada *good governance* yang di dalamnya termasuk akuntabilitas (Nurmala, 2012). Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Hamidi dan Suwardi (2013) tentang pengaruh

pengendalian intern dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengendalian intern dan budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas. Penelitian Hamidi dan Suwardi (2013) dipilih sebagai pijakan awal pada penelitian ini karena organisasi pengelola zakat merupakan salah satu dari NGO yang menjadi objek dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian tersebut. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Hamidi dan Suwardi (2013) yang sekaligus menjadi originalitas penelitian ini adalah pada variabel yang dibangun, yaitu dengan menambahkan variabel penganggaran partisipatif dan perilaku etis pimpinan.

Penelitian terkait pengaruh penganggaran partisipatif terhadap akuntabilitas telah dilakukan oleh Arifin (2012) yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian terkait perilaku etis telah dilakukan oleh Tahir *et al.* (2016) yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi oleh kesadaran pada peraturan perundang-undangan, komitmen organisasi dan peran APIP. Kesadaran pada peraturan perundang-undangan adalah satu bentuk perilaku etis karena perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan (Griffin dan Ebert, 1998).

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penelitian ini penting dilakukan guna memperbesar nilai R Square pada penelitian Hamidi dan Suwardi (2013) yang hanya mencapai 0.631. Selain itu, originalitas penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian ini akan meneliti pengaruh penganggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik dengan melakukan studi empiris terhadap manajemen *Non Government Organization* (NGO) se- Pulau Lombok.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penggunaan pendekatan kuantitatif pada penelitian ini didasarkan pada karakteristik penelitian ini, yaitu penelitian untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka atau kuantifikasi data sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram, 2008: 149). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun hasil penelitian terdahulu, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penilaian dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *eksplanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan kausalitas antar variabel. Jenis penelitian *eksplanatory* ini dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas penganggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan, budaya organisasi terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas publik.

Populasi penelitian ini adalah seluruh NGO berbadan hukum di 5 Kabupaten/Kota Se-Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai tahun 2021 sebanyak 104 NGO (Bakesbangpol Prov. NTB, 2021). Adapun jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan teknik Slovin (Sugiyono, 2011:87). Adapun unit analisis pada penelitian ini adalah Staff Keuangan dan Staff Pelaksana Program. Dengan demikian, responden pada masing-masing NGO berjumlah 2 orang sehingga total responden berjumlah 102 orang.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penganggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas publik. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2011):

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + b4.X4 + e$$

Keterangan:

- Y = akuntabilitas publik
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X1 = penganggaran partisipatif
- X2 = sistem pengendalian intern
- X3 = perilaku etis pimpinan
- X4 = budaya organisasi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun unit analisis pada penelitian ini adalah Staff Keuangan dan Staff Pelaksana Program. Dengan demikian, responden pada masing-masing NGO berjumlah 2 orang sehingga total responden berjumlah 102 orang.

Tabel 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner Menurut Persentase (%)

Keterangan	Responden	
	Jumlah	%
Kuesioner yang disebar	102	100%
Kuesioner yang kembali	98	96,07%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	5	4,90%
Kuesioner yang dapat diolah	93	91,17%

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021

Dari 102 (100%) kuesioner yang disebar, 98 (96,07%) kuesioner diterima kembali, dari 98 (96,07%) kuesioner yang kembali, 93 (91,17%) dapat diolah dan 5 (4,90%) tidak dapat diolah karena ada responden dan beberapa pertanyaan yang tidak terjawab.

Nilai koefisien Adjusted R Square bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu menjelaskan variabelitas variabel dependent.

3.1. Tabel 2 Hasil Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 ^a	.334	.304	1.677

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas besarnya angka koefisien determinasi 0,334 sama dengan 33,4%. Angka tersebut mengandung arti bahwa anggaran partisipatif, sistem pengendalian intern, perilaku etis pimpinan, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik sebesar 33,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji F dilakukan untuk melihat apakah model yang dianalisis memiliki tingkat kelayakan model yang tinggi yaitu variabel-variabel yang digunakan model mampu untuk menjelaskan fenomena yang dianalisis.

Tabel 3 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	124.186	4	31.046	11.044	.000 ^a
	Residual	247.384	88	2.811		
	Total	371.570	92			

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig untuk hasil uji kelayakan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen anggaran partisipatif, sistem pengendalian

intern, perilaku etis pimpinan, dan budaya organisasi mampu memprediksi variabel dependen akuntabilitas publik. Begitu juga dengan nilai F_{hitung} lebih besar dengan nilai F_{tabel} $11,044 > 2,47$ artinya variabel independen mampu memprediksi variabel dependen.

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	11.975	2.977	4.023	.000
Anggaran Partisipatif	.278	.117	2.374	.020
Sistem Pengendalian Intern	.152	.055	2.747	.007
Perilaku Etis Pimpinan	.204	.075	2.740	.007
Budaya Organisasi	.104	.083	1.244	.217

Sumber: Data Primer Yang Diolah Tahun 2021

Variabel anggaran partisipatif memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,374 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 atau nilai sig sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima, bahwa anggaran partisipatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran partisipatif memberikan dampak positif pada akuntabilitas publik atau anggaran partisipatif berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, artinya anggaran semakin tinggi tingkat penganggaran yang dilakukan oleh NGO di provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas publik. Pada saat penyusunan anggaran yang dilakukan oleh tim pelaksana anggaran diharapkan mampu mengetahui alur anggaran yang akan direalisasikan, tetapi pada kenyataannya di NGO provinsi nusa tenggara barat sesuai hasil penelitian ini bahwa partisipasi anggaran yang dilakukan bisa meningkatkan akuntabilitas publik sehingga kinerja dari para manajer dan tim yang berkaitan bisa dikatakan bagus.

Penelitian ini juga sejalan dengan konsep *Agency theory* hubungan kontraktual yang mensyaratkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas dari *agent* sebagai bukti bahwa wewenang yang diberikan dijalankan dengan baik. Akuntabilitas juga dimaksudkan untuk memperkecil asimetri informasi antara *agent* sebagai pemegang informasi dan *principal* sebagai peggunan informasi. Akuntabilitas pada NGO berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelola kepada para *stakeholder* yaitu donor dan masyarakat, hal ini disebut dengan akuntabilitas publik.

Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,747 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 atau nilai sig sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_2 diterima, bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern memberikan dampak positif pada akuntabilitas publik atau sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, artinya sistem pengendalian intern semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik yang dilakukan semakin baik oleh NGO di provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas publik. Salah satu hal yang menonjol pada NGO di NTB tingginya sistem pengendalian intern sebab bentuk dari peningkatan melakukan keamanan berupa aset-aset milik NGO dan juga penilaian aset selalu di laporkan pada saat mempublikasikan laporan keuangannya sehingga dengan tingginya tingkat keamanan aset akan menyebabkan akuntabilitas publik semakin tinggi.

Penelitian ini juga sejalan teori yang menyebutkan sistem pengendalian intern diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik NGO, karena pada dasarnya sistem pengendalian intern mengarahkan agar organisasi dalam mencapai tujuannya melalui

kegiatan yang efektif, efisien, keandalan laporan dan pengamanan aset, sehingga jika laporannya sudah andal maka akuntabilitas publik akan mudah terlaksana.

Variabel perilaku etis pemimpin memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,740 lebih besar dari t_{tabel} 1,98 atau nilai sig sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05, artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima, bahwa perilaku etis pemimpin berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku etis pimpinan memberikan dampak positif pada akuntabilitas publik atau perilaku etis pimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, artinya perilaku etis pimpinan semakin baik tingkat akuntabilitas publik yang dilakukan semakin baik oleh NGO di provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyebabkan peningkatan akuntabilitas publik. Konsep perilaku dalam dunia pekerjaan sangat mendorong terbentuknya kenyamanan dan kebetahan didalam pekerjaan, pembentukan perilaku pada rekan kerja mencerminkan setiap program yang dilakukan akan sangat mudah terlaksananya sebab kemudahan pekerjaan yang dilakukan akan membuat pertanggung jawaban sangat mudah sehingga konsep perilaku sangat mempengaruhi akuntabilitas publik.

Penelitian ini juga sejalan dengan konsep *stewardship theory* Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *stakeholders* pada khususnya (Daniri 2005). Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara maksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen yang tak luput dari pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen. Eksistensi pengendalian akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik.

Variabel budaya organisasi memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,244 lebih kecil dari t_{tabel} 1,98 atau nilai sig sebesar 0,217 lebih besar dari 0,05, artinya H_0 diterima dan H_3 ditolak, bahwa budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat.

Hasil penelitian ini menunjukkan budaya organisasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Nusa Tenggara Barat. Artinya semakin baik budaya organisasi tidak ada dampaknya pada akuntabilitas publik. Melakukan integrasi pada organisasi dengan membentuk kerjasama yang baik dalam sebuah organisasi akan tetapi tidak bisa bertanggung jawabkan setiap pekerjaan yang dilakukan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan konsep teori harapan yang mengatakan bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik, dan pada gilirannya menghasilkan penghargaan-penghargaan organisasional. Teori harapan memprediksi bahwa karyawan-karyawan akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara usaha dan kinerja, kinerja dan penghargaan, serta penghargaan dan pemenuhan tujuan-tujuan pribadi. Setiap hubungan ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Supaya usaha menghasilkan kinerja yang baik, individu harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja, dan sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja individu tersebut harus dianggap adil dan obyektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Anggaran partisipatif berpengaruh positif dan signifikan

terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perilaku etis pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Budaya organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas publik pada NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Saran praktis dalam sistem penganggaran partisipatif dan sistem pengendalian intern sebaiknya perlu memperhatikan konsep penilaian set lembaga atau organisasi sebab salah satu indikator utama dalam penyampaian informasi keuangan juga dengan melihat nilai seluruh total aset. Dan juga perilaku pimpinan sangat diperhatikan sebab kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan juga dengan mengetahui perilaku pimpinan

Hasil penelitian ini berimplikasi bagi stakeholder yaitu para pihak NGO di provinsi nusa tenggara barat agar lebih memperhatikan pelaporan keuangan yang di sajikan dan juga melihat sistem pengendalian intern, budaya organisasi, perilaku etis pimpinan dan anggaran yang dilakukan perlu diperhatikan juga.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi NGO di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar melakukan penyempurnaan pengelolaan sistem pelaporan kaitannya dengan akuntabilitas, dan juga perilaku para pimpinan terutama pada budaya organisasi agar setiap laporan yang bisa dipertanggung jawabkan dengan baik.

5. REFRENSI

- Abidin, Hamid dan Mimin Rukmini. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM: Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PIRAC, Ford Foundation dan Tifa.
- Antaraneews.com. 2009. *Badan Kesbangpoldagri NTB Perketat Pengawasan LSM Bermasalah*. Dikutip dari <https://mataram.antaranews.com/antnews> tanggal 12 Juli 2018.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*. New York: Mc. Graw Hill. Terjemahan Penerbit: Salemba Empat.
- Arifin W., Beny. 2012. *Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 (1), hal. 15-27.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ebrahim, Alnoor. 2015. *Ragam Wajah Akuntabilitas Organisasi Nirlaba*. Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Edisi 3 Hal. 45-72.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fikri, Ali *et al.* 2010. *Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Government Organization*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 1 (3): 409-420.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
- Griffin, Ricky W dan Donald J. Ebert. 1998. *Bussiness*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Mowen dan Hansen. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidi, Nurhasan dan Suwardi Eko. 2013. *Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi*. EKBISI Vol. VIII (1): 13 – 34.
- Harsya K. Tahir, *et al.* 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Accountability Vol. 5 (2): 37 - 51
- Hasanah, Nurmalia dan Achmad Fauzi. 2016. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: IN MEDIA

- Herdiansah dan Randi. 2016. *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*. Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol. 1 (1): 49-67.
- Herlina, Lusi. 2012. *Akuntabilitas LSM Indonesia: Antara Tuntutan dan Tanggapan*. Akuntabilitas Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Edisi 1 Hal. 5-10.
- Hopwood and Tomkins. 1974. *Issues in Public Sector Accounting*. New Jersey: M.E. Sharpe.
- Hoffstede, G. et al. 1990. *Measuring Organizational Cultures: A Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases*. Administrative Science Quarterly Vol. 35 (2): 286-316.
- _____. 1994. *Culture and Organization*. London: Harper Collin Bussines.
- Ibrahim, Rustam. 2015. *Beberapa Tantangan Akuntabilitas, Internal Governance dan "Akuntabilitas ke Bawah" untuk Pengembangan Efektivitas LSM*. Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil, Edisi 3: 7-23.
- Kaihatu, Thomas S. TT. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8 (1): 1-9.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Pers.
- Kaen, Fred. R. 2003. *A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value*. USA: AMACOM.
- Kenis, I. 1979. *The Effect Of Goal Characteristic on Managerial Attitudes Performance*. The Accounting Review Vol. 54 (4): 707-721.
- Khasanah, Dewi Nur. 2016. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas di Kota Surakarta)*. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kovach, H. 2006. *Mengarahkan Akuntabilitas di Tingkat Global: Tantangan yang dihadapi LSM Internasional, dalam Lisa Jordan dan Peter van Tuijl (eds.), Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip, dan Inovasi*. Jakarta: LP3ES dan Pokja Akuntabilitas OMS.
- Luthans, F. 2008. *Organizational Behavior, 11th edition*. New York: Mc. Graw Hill/Irwin.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, HA. Purwanugrah. 2011. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3*. Yogyakarta: BFE UGM.
- McShane, LS. dan VAS, Glinow. 2008. *Organizational Behavior Fourt Edition*. New York: Mc Graw Hill Irwin, Companies, Inc.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UUP STIE YPKN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Milani, K.W. 1975. *"The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: a Field Study"*. The Accounting Review Vol. 50 (2) Hal. 274-284.
- Mulyadi. 2001. *Balance Scorecard: Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat .
- Muid dan Nurillah. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. Vol. 3 (2): 120-134.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. <http://www.depdagri.go.id>.
- Pulu, Lily et al. 2015. *Standar Minimal Akuntabilitas LSM*. Jakarta: Konsil LSM Indonesia
- Rachman, Eileen. 2006. *The Boss is Always Right?*. Harian Kompas, 08 Juli: 51.
- Radartambora.com. 2017. *LSM KAKI NTB Dibekukan*. Dikutip dari <http://radartambora.com/> tanggal 12 Juli 2018.

- Ramon, Dolly. 2014. *Tesis: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sandovi, Lussy dan Eka Vidya Putra. 2018. *Implementasi Good NGO Governance Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal*. Jurnal Perspektif Vol. 1 (4): 27 – 32.
- Schein, HE. 1985. *An Organizational Culture and Leadership*. San Fransisco: Yose Bass Publisher.
- Schermerhorn, JG. Hunt and NR. Osborn. 2005. *Organizational Behavior. Ninth edition*. USA: John Wiley & Sons, Inc.
- Shaw, John. C. 2003. *Corporate Governance and Risk: A System Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Siegel, G. and HR. Marconi. 1989. *Behavioral Accounting*. Cincinnati Ohio: South Western Publishing Co.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sujarweni, V dan Poly Endrayanto. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sule, ET. dan K. Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Sutopo, Lita. 1988. *Teknologi Benih*. Jakarta: CV Rajawali.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Tirto. 2017. *Ada Tren Global Krisis Kepercayaan Terhadap LSM*. Dikutip dari <https://tirto.id/ada-tren-global-krisis-kepercayaan-terhadap-lsm-ckJr> tanggal 11 Juli 2018.
- Trisnawati, M.D. & Achmad, K. 2014. *Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Manado.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. <http://www.depdagri.go.id>. Diakses tanggal 03 Maret 2012.
- Wayan, Maria Eurelia. 2014. *Analisa Faktor-Faktor Penentu Budgetary Slack Pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Empiris Dengan Menggunakan Structuralequation Modeling)*. Jurnal Vokasi Indonesia Vol. 2 (1): 29-49.
- Widyaningsih, Aristanti. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan*. Jurnal Fokus Ekonomi Vol. 10 (2): 1 – 19.